

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Ringkasan Disertasi	v
Disertation Summary	xxviii
Daftar Isi	xxix
Daftar Tabel	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI	7
1. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	7
2. Pengawasan Pelayanan Publik Yang Berbasis Nilai Keadilan	13
F. KERANGKA TEORI	18
1. <i>Grand Theory</i>	18
a. Teori Keadilan	18
1). Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam.....	26
2). Teori Keadilan Pancasila	32
3). Teori Keadilan John Rawls.....	37
4). Teori Keadilan Bermanfaat Teguh Prasetyo.....	45
b. Teori Negara Kesejahteraan.....	48
2. <i>Middle Theory</i>	56
Teori Efektifitas Hukum	56
3. <i>Applied Theory</i>	58

a.	Teori Sistem Hukum	58
b.	Teori Hukum Progresif	64
c.	Teori Bekerjanya Hukum	67
G.	KERANGKA PEMIKIRAN	73
H.	METODE PENELITIAN	76
1.	Paradigma Penelitian	76
2.	Sifat Penelitian	79
3.	Jenis Penelitian	79
4.	Pendekatan Penelitian	80
5.	Sumber Data	81
6.	Teknik Pengumpulan Data	83
7.	Teknik Analisis Data	85
I.	SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI	86
J.	ORISINILITAS PENELITIAN	88
BAB. II.	TINJAUAN PUSTAKA	90
A.	Asas asas Umum Pemerintahan	90
1.	<i>Good Governance</i>	90
2.	Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	111
B.	Pengawasan.....	113
1.	Pengertian Pengawasan	113
2.	Jenis jenis Pengawasan	119
C.	Hukum Kebijakan Publik.....	127
1.	Hakekat Pelayanan Publik	135
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	140
3.	Standar Pelayanan	141
4.	Lembaga Pengawas Pelayanan Publik	142
5.	Asas dan Tujuan Kebijakan Pelayanan Publik	146
6.	Pembina dan Penanggung jawab	147
7.	Ruang Lingkup Pelayanan Publik	148

8.	Organisasi Pelayan Publik	150
9.	Standar Pelayanan Publik	154
10.	Kualitas Pelayanan Publik	155
D.	Hukum Perijinan	156
1.	Pengertian Perijinan	157
2.	Konsepsi Hukum Perijinan	157
3.	Penegakan Hukum Perijinan	158
E.	Hasil Penelitian Disertasi Sebelumnya	167

BAB. III. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG KESEHATAN SAATINI171

A.	Gambaran Umum Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang (RSUD dan Puskesmas)	171
B.	Aspek Legalitas RSUD dan Puskesmas	213
C.	Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	232

BAB. IV. PROBLEMATIKA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG KESEHATAN DALAM PRESPEKTIF UU 25/2009238

A.	Problematika Pengawasan	238
1.	Kebijakan Pemerintah..	238
2.	Perumusan Kebijakan Publik	248
a.	Partisipasi Publik	273
b.	Resistensi Kebijakan	282
3.	Proses Kebijakan & Sistem Kebijakan dlm Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia	286
B.	Kelemahan Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Bid.Kesehatan.....	296
1.	Aspek Struktur Pendekatan Kelembagaan	296
2.	Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik Bid.Kes.....	311
a.	Urgensi Pengawasan	311
b.	Pengawasan Pelayanan Publik oleh DPRD	315
1)	Kedudukan dan Fungsi DPRD	315

2) Tugas dan wewenang DPRD	315
3) Ruang Lingkup Pengawasan	318
4) Jenis Pengawasan	324
5) Bentuk Pengawasan DPRD	325
3. Pengawasan Pelayanan Publik oleh ORI.....	331
a. Kedudukan ORI dalam NKRI	331
b. Implementasi Kewenangan ORI	334
c. Sistem Pelaporan ke ORI	336
4. Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat	338
a. Tata cara Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan	338
b. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	339
c. Prinsip prinsip Pengelolaan Pengaduan	341
d. UPKP2 Kabupaten Batang	342
C. Problematika Mendasar Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	343

BAB. V. REKONSTRUKSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	352
A. Konstruksi UU No:23/2014 Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	
Melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat	352
1. Konstruksi UU No : 23/2014 Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> ..	352
B. Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik	357
1. Paradigma <i>Old Public Administration</i>	359
2. Paradigma <i>New Public Management</i>	362
3. Paradigma <i>New Public service</i>	366
C. Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Keterkaitannya dengan <i>Good Governance</i>	395
1. Konsep dan Prinsip Dasar <i>Good Governance</i>	400
D. Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pelayanan Publik di Berbagai Negara.....	411
1. Negara Finlandia	411
2. Negara Norwegia	413

3. Negara Malaysia	415
E. Rekonstruksi Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Yang Berbasis Nilai Keadilan	419
1. Nilai Pancasila	419
2. Nilai Keadilan	427
3. Partisipasi Masyarakat	434
4. Fakta Pelayanan Publik di Indonesia	443
F. Rekonstruksi Konsep Nilai Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	447
G. Rekonstruksi UU 25/2009, UU 36/2009 dan PP 96/2012	456
 BAB.VI .PENUTUP	473
A. Simpulan	473
B. Implikasi Kajian	474
C. Saran saran	478
DAFTAR PUSTAKA	480